



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 26 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
**UNIT KERJA** : UNIVERSITAS BRAWIJAYA

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : YUSUF HENDRAWAN
2. Jabatan : DEKAN
3. NHK : 263475

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN**

Rp. 20.000.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 284 m2/400 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 5.000.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 343 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 5.000.000.000
3. Tanah Seluas 154 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 202 m2/600 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 3.000.000.000
5. Tanah Seluas 193 m2 di KAB / KOTA MALANG, HASIL SENDIRI Rp. 500.000.000
6. Tanah Seluas 177 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
7. Tanah dan Bangunan Seluas 250 m2/500 m2 di KAB / KOTA KOTA MALANG , HIBAH TANPA AKTA Rp. 4.500.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN**

Rp. 430.000.000

1. MOBIL, HONDA CR-V JEEP Tahun 2011, HASIL SENDIRI Rp. 150.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 280.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA**

Rp. 188.000.000

**D. SURAT BERHARGA**

Rp. ----

**E. KAS DAN SETARA KAS**

Rp. 580.000.000



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	21.198.000.000
III. HUTANG	Rp.	----
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	21.198.000.000

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.